

**IMPLEMENTASI TENTANG PENGGUNAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SEKOLAH DASAR
NEGERI 005 KELURAHAN GUNUNG LINGAI
KECAMATAN SUNGAI PINANG
KOTA SAMARINDA**

Rinai Sinang Agustin Abun¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 005 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data kemudian akan dianalisis menggunakan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat dari Implementasi Tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 005 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda yang belum terlaksana yaitu : Pengembangan perpustakaan, Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler, Perawatan sekolah/rehab sekolah, Pembayaran Honorarium Bulanan, Membantu Peserta Didik Miskin dan Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer. Sementara yang menjadi Faktor Penghambat yaitu dana yang diberikan ke sekolah sering datang tidak tepat waktu, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan banyak yang tertunda dan kurang ketelatenan organisasi BOS Sekolah sehingga ada beberapa yang belum terpenuhi.

Kata Kunci: Implementasi, Penggunaan Dana BOS

Pendahuluan

Manusia memerlukan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha manusia dalam memperoleh ilmu pengetahuan sehingga dapat mengembangkan potensi dalam dirinya. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan” dan ayat 3 menegaskan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang”.

Seiring perkembangan suatu bangsa, dimana bangsa Indonesia mengalami perumbuhan sosial yang meningkat tinggi namun tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat, hal ini berdampak pada sektor pendidikan yang ditandai dengan banyaknya siswa yang putus sekolah karena tidak memiliki biaya untuk membeli alat tulis dan buku pembelajaran dalam rangka mengikuti kegiatan belajar-mengajar di sekolah sehingga peserta belajar tidak dapat melanjutkan sekolahnya.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah dimulai sejak bulan Juli 2005 yang mana telah berperan besar dalam percepatan program wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Dalam perkembangannya, program BOS mengalami peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran. Sejak tahun 2012 penyaluran dana BOS dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening satuan pendidikan secara langsung dalam bentuk hibah.

Dalam berjalanya Program BOS yang bertujuan membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi satuan pendidikan; Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta; Meringankan beban biaya operasi satuan pendidikan bagi peserta didik di satuan pendidikan swasta, namun masih ada terdapat permasalahan salah satunya penggunaan dana BOS itu sendiri. Dimana penggunaan dana BOS tidak digunakan sebagaimana mestinya, masih ada terdapat masalah dalam proses belajar-mengajar diantaranya tidak adanya perawatan sekolah/rehab sekolah dalam perbaikan saluran air hujan dan kurang maksimalnya pemberian bantuan dana kepada peserta didik miskin (terdapat beberapa peserta didik miskin yang tidak menerima bantuan dana tersebut).

Maka dalam hal ini setiap tim pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang telah diatur dalam Keputusan Walikota Samarinda Nomor 900.03/651/HK-KS/XII/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kota Samarinda Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Sehingga dana BOS yang telah digulirkan dapat di gunakan sebagaimana mestinya. Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini akan memberikan gambaran bagi peneliti untuk meneliti lebih jauh secara ilmiah mengenai Penggunaan Dana BOS di sekolah. Maka

penulis mengambil judul : “Implementasi Tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 005 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda”.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Kata *policy* secara etimologis berasal dari kata polos dalam bahasa Yunani (*Greek*) berarti negara atau kota. Dalam bahasa Latin berubah menjadi *politia* yang berarti negara, sedangkan dalam bahasa Inggris Lama (*Middle English*) menjadi *policie* yang berkaitan dengan urusan administrasi pemerintahan.

Pengertian Kebijakan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Arifin Tahir 2014:21) kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi dan sebagainya). Menurut Mustopadidjaja (dalam Arifin Tahir 2014:21) menjelaskan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Hal ini senada dengan Easton (dalam Arifin Tahir 2014:21) mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai alokasi otoritatif bagi seluruh masyarakat sehingga semua yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan adalah hasil alokasi nilai-nilai tersebut. Sementara menurut Koontz dan O'Donnell (dalam Arifin Tahir 2014:21) mendefinisikan kebijakan sebagai pernyataan umum dari pengertian yang memandu pikiran dalam pembuatan keputusan. Sedangkan menurut Anderson (dalam Arifin Tahir 2014:21) kebijakan suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Pengertian Kebijakan Publik

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano (dalam Harbani 2007:38) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah.

Menurut William N. Dunn (dalam Harbani 2007:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-

bidang yang menyangkut tugas pemerintah seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Menurut Thomas R. Dye (dalam Harbani 2007:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi suatu tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Sedangkan menurut Chaizi Nasucha (dalam Harbani 2007:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum.

Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu bentuk intervensi atau tindakan tertentu dari pemerintah yang dirancang untuk mencapai suatu hasil yang diterapkan. Menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup banyak macam kegiatan :

1. Badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar (sumber-sumber ini meliputi personil, peralatan, lahan tanah, bahan-bahan mentah dan diatas semuanya).
2. Badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkret, regulasi, serta rencana-rencana desain program.
3. Badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja.
4. Badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target.

Bantuan Operasional Sekolah

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan

pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Implementasi Program BOS

Implementasi merupakan suatu bentuk intervensi atau tindakan tertentu dari pemerintah yang dirancang untuk mencapai suatu hasil yang diterapkan. Menurut rumusan Sabatier dan Mazamnian (dalam Anggara 2014:273) yakni peristiwa dan kegiatan dalam usaha untuk mengadministrasikan dan usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat.

A. Satuan Pendidikan Penerima BOS

Ketentuan bagi satuan pendidikan penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebagai berikut:

1. Semua satuan pendidikan SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/Satap, dan SLB negeri yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) wajib menerima dana BOS;
2. Semua satuan pendidikan swasta yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) dan sudah memiliki izin operasional berhak menerima dana BOS. Satuan pendidikan swasta berhak menolak dana BOS, dimana penolakan tersebut harus memperoleh persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah, dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik miskin di satuan pendidikan tersebut;
3. Semua satuan pendidikan SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT/Satap negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali peserta didik;
4. SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT/Satap swasta yang memungut biaya pendidikan harus mengikuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
5. Satuan pendidikan dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali peserta didik yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh satuan pendidikan. Sumbangan dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya;
6. Pemerintah Daerah harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali peserta didik tersebut

mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparan dan akuntabel;

7. Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh satuan pendidikan apabila satuan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.

B. Program BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu

Melalui program BOS SD dan SMP yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu;
2. BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada peserta didik miskin putus satuan pendidikan karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam/alat tulis satuan pendidikan dan biaya lainnya;
3. BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat melanjutkan ke tingkat SMP;
4. Kepala satuan pendidikan SD/SDLB menjamin semua peserta didik yang akan lulus dapat melanjutkan ke tingkat SMP/SMPLB; Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah;
5. Kepala sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah.
6. Kepala Sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel;
7. BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada satuan pendidikan. Sumbangan sukarela dari orang tua peserta didik harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan sumbangan.

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Dana BOS diterima oleh satuan pendidikan secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh satuan pendidikan dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel dan transparan;
2. Satuan pendidikan melakukan evaluasi diri sekolah secara rutin;

3. Satuan pendidikan harus memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan;
4. Satuan pendidikan harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut;
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi diri sekolah;
6. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/kota (untuk satuan pendidikan negeri) atau yayasan (untuk satuan pendidikan swasta).

Penggunaan Dana BOS

Terdapat beberapa komponen penggunaan dana BOS serta terdapat beberapa hal penting mengenai larangan penggunaan dana BOS yang diatur dalam Keputusan Walikota Samarinda Nomor 900.03/651/HK-KS/XII/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kota Samarinda Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Metodelogi Penelitian

Jenis penelitian di dalam penulisan Skripsi ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. menurut Mukhtar (2013 : 29) “Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan sebuah fakta empiris secara obektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan didukung oleh metodologi dan teoretis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni.

Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian skripsi ini, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian dalam pengumpulan data-data, diperlukan sejumlah teknik. Untuk itu, penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data dalam skripsi ini. Teknik-teknik tersebut ialah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan, yaitu penulis mempelajari dan menggali konsep-konsep dan teori-teori yang relevan, baik yang berasal dari literatur, kitab undang-undang atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini, sedangkan studi lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung pada obyek penelitian di lapangan, dengan menggunakan beberapa teknik antara lain observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data Model Siklikal. Berdasarkan hasil wawancara

penulis akan melakukan analisis dengan beberapa tahapan diantaranya : analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema.

Penutup

Kesimpulan

a. Pengembangan Perpustakaan

Dalam Pengembangan Perpustakaan di Sekolah Dasar Negeri 005 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda terdapat beberapa faktor yang belum terlaksana seperti Pemeliharaan dan pembelian AC di perpustakaan. Dimana hal ini sangat di abaikan. Terdapat alasan mengenai Tidak terlaksananya Pemeliharaan dan pembelian AC di perpustakaan yaitu menurut mereka hanya menggunakan kipas angin itu sudah cukup bagi siswa-siswi disekolah tersebut, oleh karena itu aparatur sekolah menunda untuk pembelian AC perpustakaan.

b. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru

Berdasarkan hasil wawancara, maka peneliti mendapatkan informasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Dasar Negeri 005 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda sudah berjalan dan terkondir dengan baik, tanpa ada permasalahan yang timbul.

c. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

Berdasarkan hasil wawancara, maka peneliti mendapatkan informasi Dalam Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri 005 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda terdapat beberapa Kegiatan Pembelajaran yang belum terlaksana yaitu Olahraga dan UKS. Faktor yang menjadi penghalang/penghambatnya kegiatan siswa/i untuk melaksanakan kegiatannya di luar kelas, Seperti :

- 1) Olahraga,
- 2) UKS

Yaitu tidak memiliki lapangan yang semestinya sehingga para siswa-siswi tidak leluasa dalam melakukan/melaksanakan olahraga, kecilnya lahan terbuka disekolah tersebut dan lapangan yang becek. Gedung UKS yang dimana berfungsi untuk memberikan pertolongan bagi siswa/i yang sakit tetapi ditutup tidak dipergunakan lagi, dan alat-alat UKS disimpan di Ruang Dewan Guru. Terdapat beberapa alasan mengenai ditutupnya Gedung UKS yaitu, tidak adanya peralatan-peralatan, tidak ada aparatur yang menjaga dan memelihara gedung tersebut.

d. Kegiatan Ulangan dan Ujian

Dalam Kegiatan Ulangan dan Ujian di Sekolah Dasar Negeri 005 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Pembelian Bahan Habis Pakai

Dalam Pembelian Bahan Habis Pakai di Sekolah Dasar Negeri 005 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik sesuai dengan hal-hal yang dijabarkan dalam pembelian bahan habis pakai.

f. Langganan Daya dan Jasa

Dalam Langganan Daya dan Jasa di Sekolah Dasar Negeri 005 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda sudah terlaksana sebagaimana mestinya, seperti yang telah diungkapkan oleh aparaturnya di tahap wawancara.

g. Perawatan Sekolah/Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah

Berdasarkan hasil wawancara, maka peneliti mendapatkan informasi Dalam Perawatan Sekolah/Rehab Ringan dan Sanitasi Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 005 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik. Namun dalam perawatan sekolah atau rehap sekolah dalam perbaikan saluran air hujan tidak berjalan baik, terbukti tidak adanya saluran air hujan seperti selokan di sekitar lapangan sekolah dan di depan sekolah sehingga hal ini mengakibatkan genangan air dimana-mana dan banjir selalu mengenai sekolah tersebut jika terjadinya hujan.

h. Pembayaran Honorarium Bulanan

Berdasarkan hasil wawancara, maka peneliti mendapatkan informasi Dalam Pembayaran Honorarium Bulanan di Sekolah Dasar Negeri 005 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Namun dalam pembayaran Honorarium penjaga sekolah belum terlaksana, dikarenakan sekolah tersebut belum memiliki penjaga sekolah hingga pada saat ini. hal ini disebabkan karena dana tersebut dialihkan untuk kegiatan lainnya sehingga dan untuk membayar Honorarium penjaga sekolah di ada.

i. Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan

Dalam Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Dasar Negeri 005 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

j. Membantu Peserta Didik Miskin

Dalam Membantu Peserta Didik Miskin di Sekolah Dasar Negeri 005 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda belum berjalan baik, hal ini disebabkan terdapat kesalahpahaman dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang digulirkan oleh BOSDA. Dari salah satu aparaturnya mengatakan bahwa ini disebabkan oleh keterlambatan dalam pemberian dana dari BOS ke sekolah tersebut,

namun dari pihak lain mengatakan tidak mengetahui jika ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada peserta didik miskin.

k. Pembiayaan Pengelolaan Sekolah

Berdasarkan hasil wawancara, maka peneliti mendapatkan informasi Dalam Pembiayaan Pengelolaan Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 005 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. Seperti Penggandaan laporan dan surat-menyurat, Insentif bagi tim penyusun laporan BOS, Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/ Kantor Pos, Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS, kecuali untuk pembayaran honor sudah terlaksana dan dapat berjalan dengan baik.

l. Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer

Dalam Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer di Sekolah Dasar Negeri 005 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda seperti, Membeli komputer *desktop/work station*, Membeli *printer* atau *printer plus scanner*, Membeli laptop sudah dilaksanakan dengan baik sesuai yang telah ditetapkan. Namun terdapat 1 komponen perangkat yang belum terlaksanakan yaitu Membeli proyektor, hal ini disebabkan dana yang seharusnya digunakan untuk membeli proyektor ternyata dialihkan untuk kegiatan lainnya.

1. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 005 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda

Dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 005 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam kegiatan tersebut yaitu :

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam Implementasi Tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 005 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda yaitu sekolah yang terletak di pinggir jalan sehingga para guru-guru yang melaksanakan kegiatan luar bisa mendapatkan angkutan umum jika tidak membawa kendaraan pribadi dan alat-alat dalam melakukan perawatan dan rehap sekolah tersedia, adanya petugas untuk merawat sekolah.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri 005 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda

yaitu dana yang diberikan ke sekolah sering datang tidak tepat waktu, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan banyak yang tertunda dan kurang ketelatenan organisasi BOS Sekolah sehingga ada beberapa yang belum terpenuhi.

Saran

1. Dalam Pengembangan Perpustakaan seperti Pemeliharaan dan pembelian AC di perpustakaan sebaiknya segera di laksanakan. Karena ini sangat berdampak besar dalam menunjang konsentrasi siswa dalam kegiatan belajar, sehingga siswa tidak merasa kepanasan dan tidak mengganggu konsentrasi siswa.
2. Dalam kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler sebaiknya segera di laksanakan seperti pengadaan Lapangan agar siswa-siswi bisa melaksanakan olahraga, maupun upacara dan pengadaan gedung UKS
3. Dalam pelaksanaan perawatan sekolah/rehap sekolah dalam perbaikan saluran air hujan sebaiknya lebih ditingkatkan lagi, agar proses belajar-mengajar tidak terganggu apabila terjadinya hujan dan lingkungan sekolah dapat digunakan dalam berbagai kegiatan, seperti upacara, olahraga dan kegiatan lainnya.
4. Dalam Pembayaran Honorarium Bulanan secara khusus untuk penjaga sekolah sebaiknya di laksanakan. Karena penjaga sekolah juga sangat membantu keamanan di sekitar sekolah.
5. Dalam Membantu Peserta Didik Miskin sebaiknya segera dilaksanakan, Aparatur sekolah yang mengelolah dana tersebut dapat saling mengkoordinasi sehingga tidak ada pelaksana dana BOS yang tidak mengetahui pengelompokan dana-dana tersebut dan dalam mengalokasikan data siswa agar siswa-siswa yang berhak menerima bisa menggunakan dana tersebut dalam kegiatan belajar.
6. Dalam Pembelian dan Perawatan Perangkat Komputer secara khusus pembeli proyektor, sebaiknya segera di laksanakan. Karena proyektor sangat bermanfaat dalam kegiatan belajar-mengajar dalam kelas. Apabila ada materi yang ingin di tunjukan sehingga siswa-siswi tidak merasa bosan apabila selalu berhadapan dengan buku.
7. Diharapkan untuk saling berkordinasi kepada pemberi dana BOS agar dapat dicairkan kesekolah sesuai dengan waktunya sehingga kegiatan-kegiatan tidak tertunda lagi dan saling berkordinasi dengan pihak penyelenggara dana BOS sehingga tidak ada kelalaian yang terjadi.
8. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat memberikan seminar-seminar kepada tim pelaksana dana BOS, sehingga para aparatur sekolah terutama panitia pelaksana dana BOS di sekolah tersebut memiliki sifat ketelatenan dalam pengelompokan dana BOS Sekolah.

Daftar Pustaka

- Anggara, Sahya, 2014. *Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Fermana, Surya, 2009. *Kebijakan Publik (Sebuah Tinjauan Filosofis)*, Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Huberman & Miles, 2014. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan Publik (Berbasis Dynamic Policy Analysis)*, Yogyakarta: Gava Media.
- Lubis, M, Solly, 2007, *Kebijakan Publik*, Medan: CV. Mandar Maju
- Maleong, Remy, J, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar, 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: Referensi(GP Press Group).
- Munadi, Muhammad & Barnawi, 2011. *Kebijakan Publik (Di Bidang Pendidikan)*, Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Pasolong, Harbani, 2010. *Teori Administrasi Negara*, Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani, 2013. *Teori Administrasi Negara*, Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani, 2013, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin, 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Bandung : Alfabeta.
- Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik*, Pringwulung: C A P S.

Sumber Lain

Dokumen-dokumen :

- Juknis BOS 2016, *Permendikbud No.80 Tahun 2015*. Pemerintah Kota Samarinda, Dinas Pendidikan.
- Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kota Samarinda Tahun 2016. *Keputusan Walikota Samarinda Nomor.900.03/651/HK-KS/XII/2015*. Pemerintah Kota Samarinda, Dinas Pendidikan.
- Laporan Bulanan April 2017,